

KOMITMEN PIMPINAN PADA PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR

Leader's Commitment Towards Stunting Reduction In Tuban East Java

Dian Shofiya^{1*}, Inne Soesanti², Rachmaniah², Mujayanto², Winarko², Sa'idah Zahrotul Jannah³

¹. Mahasiswa Program Doktor, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya

². Dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya

³. Dosen Universitas Airlangga Surabaya.

*E-mail : dian.ofiya-2018@fkm.unair.ac.id

ABSTRAK

Stunting menyebabkan lemahnya persaingan sumber daya manusia (SDM) suatu negara, karena selain tampilan fisik juga berdampak pada kemampuan kognitif. Hasil SSGI21 menyatakan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4%. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting tahun 2024 menjadi 14%. Untuk mencapai angka tersebut memerlukan komitmen ditingkat pusat sampai dengan desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui komitmen pemerintah dan masyarakat desa dalam percepatan penurunan stunting. Metode penelitian ini adalah *mix method* yang menggabungkan data kualitatif dan data kuantitatif. *Focus Group Discussion* merupakan cara pengumpulan data secara kualitatif. Pengumpulan data secara kuantitatif diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Partisipan dalam FGD adalah kepala desa dan pamong desa, bidan desa, bidan Puskesmas, serta anggota TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) di tingkat desa. Penelitian dilakukan di 10 desa lokus stunting di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan aparat dan masyarakat masih rendah. Komitmen pemerintah dan masyarakat desa dikelompokkan dalam dua hal, yaitu komitmen dalam pendanaan dan komitmen dalam (SDM). Komitmen pendanaan masih sangat bergantung pada dana pemerintah pusat dan bersumber pada dana desa yang sangat terbatas dan lebih berpusat pada pemberian makanan tambahan. Komitmen yang tinggi ditunjukkan oleh SDM dari sektor formal seperti bidan desa, PLKB dan nonformal seperti PKK, kelompok pengajian. Pengetahuan SDM dari sektor non formal masih perlu ditingkatkan. Perlu didorong penambahan dana percepatan penurunan stunting baik dari dana desa ataupun dari sektor lain, misalnya CSR perusahaan yang ada di Kab. Tuban serta peningkatan pengetahuan tentang stunting pada petugas dan masyarakat.

Kata kunci: stunting, komitmen pimpinan, dana desa.

ABSTRACT

Stunting causes weak competition in a country's human resources (HR), in addition to physical appearance, it also has an impact on cognitive abilities. The results of SSGI21 stated that the prevalence of stunting in Indonesia was 24.4%. The government targets the prevalence of stunting in 2024 to be 14%. It requires leader's commitment at the top to bottom levels. The aim was to determine leader's commitment at the top to bottom levels in accelerating stunting reduction. This is a mixed methods research. Qualitative data collection was carried out with focus group discussions and questionnaires for qualitative data collection. FGD participants were village heads and officials, midwives, and village level TPPS members (Team for the Acceleration of Stunting Reduction). The research locations were 10 stunting loci villages in Tuban, East Java. Research shows that knowledge of stunting is still low. Funding commitments are highly dependent on central government assistance through village funds. The allocated village funds are very limited and focus more on providing additional food. The lack of budget allocation causes stunting reduction efforts to be ineffective. High commitment is shown by human resources from the formal sector such as village midwives, PLKB and non-formal such as PKK, recitation groups. Knowledge about stunting among non-formal workers still needs to be improved. Researchers suggest increasing stunting knowledge in the community and increasing the budget for stunting reduction, both from village funds and from other sources.

Keywords: stunting, leadership commitment, village fund.

PENDAHULUAN

Dampak stunting diantaranya adalah pertumbuhan tampilan fisik dimana BB/U yang tidak memadai serta adanya gangguan kecerdasan sebagai akibat terjadinya gangguan kognitif. Hal tersebut menyebabkan rendahnya daya saing masyarakat baik di tataran nasional bahkan di tingkat Dunia. World Health Organization menargetkan prevalensi stunting di dunia sebesar 20% pada tahun 2020. Nyatanya pada tahun 2021 angka stunting Indonesia pada saat itu berada pada 24.4% (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Prevalensi tersebut sudah membaik dibandingkan prevalensi sebelumnya. Trend prevalensi di Indonesia sejak tahun 2013 adalah 37,2% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 30,8% pada tahun 2018 (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Artinya pada periode 2013-2018-2021 angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan rata-rata antara 1, 28% pertahun dan 2,1 % pertahun. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada pasal 5 (1), menargetkan angka stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024 (Indonesian Government, 2021) (Lembaran Negara, 2021). Artinya harus terjadi penurunan stunting sebesar 10,4% atau rata-rata 3,4% dalam setahun.

Guna mempercepat penurunan stunting maka perlu disusun suatu kerangka perencanaan yang yang dituangkan dalam 8 aksi konvergen percepatan penurunan stunting. Kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan kegiatan dalam 5 pilar kegiatan penurunan stunting. 5 Pilar tersebut saling menguatkan dan saling mendukung, 1. Komitmen dan Visi pimpinan., 2. Sosialisasi dan Komunikasi perubahan perilaku., 3. Konvergensi, Koordinasi dan Konsultasi program pusat, daerah dan desa., 4. Ketahanan Pangan dan Gizi., dan 5. Pemantauan dan Evaluasi .

Untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% maka perlu adanya komitmen semua pihak, perlu kolaborasi yang kuat dari berbagai sektor diantaranya pemerintah daerah, pengusaha, swasta, lembaga swadaya masyarakat serta akademisi. Komitmen pimpinan daerah sangat penting. Hal tersebut karena pimpinan daerah yang dapat melakukan mobilisasi, baik itu mobilisasi sumber

daya manusia (SDM), maupun sumber dana yang ada. Komitmen pimpinan dalam upaya penurunan stunting perlu diwujudkan dalam upaya kongkrit yaitu berupa pengucuran dana untuk percepatan penurunan stunting.

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana komitmen pimpinan dalam percepatan penurunan stunting. Komitmen dalam produk hukum apa saja yang telah diterbitkan, komitmen dalam pendanaan yaitu berapa besar dana yang telah digunakan untuk penurunan stunting serta sumber daya apa saja yang telah digerakkan dalam upaya percepatan stunting.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi, untuk mengetahui fenomena komitmen pada pimpinan terhadap percepatan penurunan stunting, yang kemudian diolah untuk menemukan makna dari apa yang dipaparkan oleh partisipan. Partisipan pada penelitian ini adalah Kepala desa, pamong desa, Kepala Dusun, Ketua PKK, Kader posyandu, Bidan desa dan guru PAUD. Lokus penelitian adalah 10 desa lokus stunting yaitu : Desa Tanjungrejo, Desa Saringambat, Desa Kedungjambe, Desa Mergosari, Desa Mulyoagung, Desa Grabagan, Desa Waleran, Desa Ngandong, Desa Latsari dan Desa Sendangharjo. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan FGD (Focus group discussion). Desa lokus stunting dipilih berdasarkan pada SK Lokus stunting yang memiliki angka stunting tinggi. Instrumen utama pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara bertanya dan mendengar. Analisis data kualitatif dilakukan dideskripsikan dan dirangkum dari kata-kata selama FGD berlangsung. Langkah analisis data yang dilakukan adalah mendengar dan menuliskan keterangan yang telah diperoleh pada saat FGD dan membuat deskripsi kemudian melaporkannya dalam bentuk narasi.

Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari Universitas Airlangga faculty Of Dental Medicine Health Research Ethical Clearance Commission dengan judul penelitian Desa EMAS (Eliminasi Stunting) as an Effort to Reduce Stunting Through Strengtening the 5 Pilar in the

East Java. Atas nama Dr. Siti Rahayu Nadhiroh, SKM.,M.Kes. Nomer sertifikat: 711/HRECC. FODM/IX/2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti diantaranya adalah 1. Bagaimana komitmen yang berkaitan dengan pendanaan pada program percepatan penurunan stunting di desa,

2. Bagaimana komitmen yang berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) pada program percepatan penurunan stunting di desa.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada lebih dari -2SD yang telah ditetapkan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh terjadinya infeksi yang berulang pada ibu ketika hamil atau infeksi yang berulang pada saat masa 2 tahun setelah kelahiran. Adalah erat kaitannya antara infeksi yang terjadi dengan kejadian stunting. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Arini menmerikan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi infeksi dan kejadian stunting (Arini, Nursalam, Mahmudah, & Faradilah, 2020). Kejadian infeksi yng berulang ada kemungkinan karena adanya kecukupan nutrisi yang tidak terpenuhi. Kecukupan nutrisi dapat berasal dari gizi makro dan gizi mikro yang disajikan dalam menu harian.

Income perkapita penduduk Kabupaten Tuban adalah Rp. 388 176 dan memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 192 580 atau 16,31% penduduk Kabupaten Tuban adalah penduduk miskin (BPS Kabupaten Tuban, 2019). Oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya kecukupan energy bagi balita stunting dan kelompok beresiko stunting, maka pemerintah harus memprioritaskan dana bantuan bagi keluarga dengan anggota beresiko stunting.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam FGD, partisipan dari kelompok Kepala desa menyatakan telah sejak lama menyalurkan dana desa untuk pemberian makanan tambahan di Posyandu, bahkan sejak sebelum ada program stunting mengemuka. Pendapat ini juga dibenarkan oleh kader dan PKK sebagai pihak yang biasa mengelola dana bantuan untuk pemberian makanan tambahan bagi balita

di Posyandu. Namun setelah dilakukan konfirmasi dengan bidan desa diperoleh informasi bahwa pemberian makanan tambahan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi balita stunting saja tetapi bagi semua balita yang hadir ke Posyandu. Tidak ada perbedaan kalori antara anak balita stunting dan non stunting.

Didalam penjelasan Umum PMT Lokal dan PDK (Pangan Olah Diet Khusus) dijelaskan bahwa PMT untuk balita di Posyandu adalah memiliki energy sebesar 200 Kkal bagi anak usia 6-8 Bulan, 300 Kkal untuk anak usia 9-11 bulan, 550 Kkal untuk anak usia 12-23 Bulan dan 1400 Kkal untuk anak usia 25-59 Bulan. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan PMT yang selama ini diberikan oleh kader dan PKK di Posyandu. Senagkan makanan tambahan untuk ibu hamil sebesar 500 – 700 Kkal untuk menu makanan lengkap atau 500-530 Kkal untuk menu kudapan (Kementrian Kesehatan RI, 2006). Jika dilihat dengan jumlah kalori yang dibutuhkan maka makanan tambahan yang diberikan pada saat posyandu sangat jauh dari memenuhi kebutuhan.

Selain bantuan yang diberikan di Posyandu, terdapat dana bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH (Pendampingan Keluarga Harapan). Setelah dikonfirmasi dengan pamong desa, ternyata bantuan tersebut ditujukan untuk golongan masyarakat tertentu, tetapi tidak secara khusus diperuntukkan balita stunting, ibu hamil KEK dan keluarga beresiko stunting.

Komitmen pemerintah juga dapat dilihat adanya produk hukum, berupa Surat Tugas Bupati, Peraturan Bupati ataupun petunjuk teknis tentang pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tuban bahwa seluruh desa yang ada di Kabupaten Tuban telah memiliki SK Tim Percepatan Penurunan Stunting. Namun belum semua desa melakukan sosialisasi kepada anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting, sehingga masih ada anggota tim yang belum mengetahui jika dirinya masuk dalam tim. Beberapa desa yang telah melakukan sosialisasi juga masih terlihat adanya anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting yang belum memahami tugas dan

fungsinnya dalam kegiatan percepatan penurunan stunting.

Penanganan kasus stunting harus dilakukan secara multi sektor, sektor kesehatan, pertanian, perkebunan, ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu harus ada kerjasama dan keterlibatan lintas program dan lintas sektor. Kepala Desa memberikan informasi bahwa setiap program yang ada di desa sebetulnya jika ditarik garis lurus semuanya dapat bermuara ke penanganan stunting. Tetapi selama ini masih belum ada upaya untuk menyatukan visi pada setiap kegiatan, sehingga hasilnya masih belum maksimal. Dari hasil FGD diperoleh informasi bahwa selama ini guru PAUD masih belum berperan dalam penanganan stunting dan belum pernah diberikan informasi kegiatan percepatan penurunan stunting di desanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komitmen pimpinan telah terlihat pada terbitnya produk hukum berupa Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Namun masih belum ada produk hukum yang bersifat teknis untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Belum semua desa melakukan sosialisasi tugas dan fungsi kepada masing-masing anggota tim percepatan penurunan stunting. Anggaran telah dikeluarkan baik oleh desa maupun oleh bantuan lain tetapi masih bersifat umum dan belum berfokus pada balita stunting dan keluarga beresiko stunting. Sumberdaya manusia telah banyak melakukan kegiatan tetapi belum semua terlibat dalam kegiatan percepatan penurunan stunting, misalnya bisang pendidikan dalam hal ini adalah PAUD.

Saran yang dapat diberikan agar pimpinan desa melakukan sosialisasi kepada seluruh tim percepatan penurunan stunting, memfokuskan sekaligus menambah besarnya anggaran untuk balita stunting dan keluarga beresiko stunting dan melibatkan semua komponen masyarakat untuk melakukan percepatan penurunan stunting.

ACKNOWLEDGEMENT

Ucapan terimakasih ditujukan kepada KEDAIREKA MACHING FUND dan BKKBN

yang telah memberi dana dan fasilitas sehingga penelitian dapat diselenggarakan dengan baik. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada kepala daerah Kabupaten Tuban, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Grabagan dan Kecamatan Kota Tuban yang telah memberi izin untuk terlaksananya kegiatan penelitian. Akhirnya ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada kepala desa dan masyarakat Desa Tanjungrejo, Desa Saringambat, Desa Kedungjambe, Desa Mergosari, Desa Mulyoagung, Desa Grabagan, Desa Waleran, Desa Ngandong, Desa Latsari dan Desa Sendangharjo. Semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk percepatan penurunan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, D., Nursalam, N., Mahmudah, M., & Faradilah, I. (2020). The incidence of stunting , the frequency / duration of diarrhea and Acute. *Journal of Public Health Research*, 9(1816), 117–120. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7376488/pdf/jphr-9-2-1816.pdf>
- BPS Kabupaten Tuban. (2019). Kabupaten Tuban Dalam Angka 2019, vii–318. Retrieved from <http://tubankab.bps.go.id>
- Indonesian Government. (2021). Presidential Decree of Republic Indonesia No 72/2021 about Accelerating Stunting Reduction. *Indonesian Government*, (1), 23.
- Kementrian Kesehatan RI. (2006). (*MP-ASI*) *LOKAL*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. Retrieved from <http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>
- Kementrian Kesehatan RI. (2019). *Laporan Nasional Riskesdas 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Jakarta: Lembaga Penerbit badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. Retrieved from http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Kementrian Kesehatan RI. (2021). *Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021*. (-, Ed.), *Kementrian Kesehatan RI* (Vol. 1). Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. <https://doi.org/10.36805/bi.v2i1.301>